



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2,117.228.353.493,00 (*Dua Trilyun Seratus Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.291.824.704.944,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.405.000.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.106.350.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.320.779.534,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.992.575.410,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.405.000.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.005.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya.
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron.
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.005.000.000,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.29.000.000.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.21.106.350.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.311.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.585.350.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.210.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.311.000.000,00 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Sebelah Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*Delapan*

Ratus Juta Rupiah).

- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*Sebelas Juta Rupiah*).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.585.350.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.128.520.000,00 (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.520.000.000,00 (*Tujuh Milyar Lima*

Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.380.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).*
- (8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.856.450.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)), yang terdiri atas :*
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan angkutan Umum; dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah)*
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.24.320.779.534,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.*

Pasal 12

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan.

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha.
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.007.826.106,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Rupiah*).
 - (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.760.481.005,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
 - (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.552.472.422,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.176,992,575,410,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

- j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.188.710.883,00 (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
 - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Delapan Milyar Rupiah*).
 - (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*).
 - (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8.079.078.498,00 (*Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
 - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
 - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.162.826.286.029,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Tanah ;

- b. Hasil Penjualan Alat dan Mesin ; dan
 - c. Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).
 - (3) Hasil Penjualan Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
 - (4) Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00 (*Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.188.710.883,00 (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Pasal 18

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ;
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. Rp. 8.079.078.498,00 (*Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*)), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

Pasal 21

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparat Sipil Negara.

Pasal 22

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.162.826.286.029,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Pendapatan Badan Layanan Umum dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan
- c. Pendapatan Badan Layanan Umum dari Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum yang Sah.

Pasal 23

Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.773.681.223.000,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1,576,697,073,000,00 (*Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.196.984.150.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.325.254.875.000,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus*

Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 243.674.506.000,00 *(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).*
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.767.692.000,00 *(Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).*

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.523.986.000,00 *(Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).*
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 854.879.952.000,00 *(Delapan Ratus Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).*
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.128.165.157.000,00 *(Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).*
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.309.685.780.000,00 *(Tiga Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);*

Pasal 27

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (3) terdiri atas Dana Desa.

Pasal 28

Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (4) terdiri atas Insentif Fiskal.

Pasal 29

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.11.084.000.000,00 (*Sebelas Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 30

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.110.148.353.493,00 (*Dua Trilyun Seratus Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 31

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.480.525.124.786,00 (*Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.799.992.431.262,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.526.146.283.154,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh*

Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.144.864.910.370,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.071.500.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.528.596.359.414,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.350.083.817,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.153.358.332.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.25.063.139.594,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.734.716.437,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.889.800.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.109.870.182,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.158.122.827.341,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.127.919.553,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp.45.811.465.317,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.554.405.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.66.277.099.017,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Belas Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.153.142.696.744,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 34

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdiri atas belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 35

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.079.157.800,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.252.642.570,00 (*Delapan Puluh Dua Milyar*

Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.045.150.000,00 (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.074.400.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.19.413.560.000,00 (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.086.500.000,00 (*Lima Milyar Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.600.000.000,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.385.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.228.707.778.637,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.3.999.350.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.39.315.333.121,00 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.525.421.038,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.123.924.846.000,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.347.765.893,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga*).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.860.594.769,00 (*Enam Milyar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 38

Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 39

- (1) Anggaran modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.678.756.892,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.219.000.000,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.142.155.000,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 212.700.000,00 (*Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.433.514.690,00 (*Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.575.767.960,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.395.622.752,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h direncanakan sebesar Rp.576.106.800,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.508.939.027,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.25.120.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.85.700.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.354.400.000,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.87.550.000,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 40

Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung.

Pasal 41

- (1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.385.946.000,00 (*Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.768.000.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus*

Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.770.900.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.806.352.100,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.275.881.609,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 43

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 44

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp.395.415.450.070,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.9.051.135.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.386.364.315.070,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa ; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.940.500.000,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.110.635.000,00 (*Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 47

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 48

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.33,558,425,549,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 49

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 50

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri atas Penghematan Belanja.

Pasal 51

Anggaran Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 52

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b direncanakan sebesar Rp.7.080.000.000,00 (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal.

Pasal 53

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.33.558.425.549,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.33.558.425.549,00 (*Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 54

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 55

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 27 Desember 2023



Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 27 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 68



KABUPATEN WONOSOBO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.824.704.944,00
4.1.01	Pajak Daerah	69.405.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	500.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	500.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.000.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.500.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.500.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18.005.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	18.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	18.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	100.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	300.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	300.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	300.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	29.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	29.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.106.350.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	9.311.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	600.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00
4.1.02.01.01.0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	0,00
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	600.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.667.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.375.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.458.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.585.350.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	0,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	55.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	128.520.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	128.520.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.520.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.520.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.380.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.380.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.856.450.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.856.450.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.210.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.320.779.534,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	24.320.779.534,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.007.826.107,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.007.826.107,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.760.481.005,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.760.481.005,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.552.472.422,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	5.552.472.422,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.992.575.410,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.500.000,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	1.000.000,00
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.000.000,00
4.1.04.01.01.0003	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00
4.1.04.01.01.0004	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00
4.1.04.01.02.0059	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
4.1.04.01.02.0066	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00
4.1.04.01.02.0132	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0133	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0134	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0135	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0137	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0139	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.02.0140	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0142	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0145	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	1.000.000,00
4.1.04.01.02.0146	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00
4.1.04.01.02.0147	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00
4.1.04.01.07	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud	6.500.000,00
4.1.04.01.07.0002	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	6.500.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	50.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	50.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.188.710.883,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.188.710.883,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.188.710.883,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.079.078.498,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.079.078.498,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	8.079.078.498,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	5.000.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00
4.1.04.15.08.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	162.826.286.029,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	161.846.286.029,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	161.846.286.029,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	280.000.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	280.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	700.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	700.000.000,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.773.681.223.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.697.073.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.325.254.875.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.523.986.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.848.660.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.350.207.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	589.383.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.277.242.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.112.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	83.687.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	21.851.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	227.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	238.460.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	854.879.952.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0001	DAU	740.064.792.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.049.660.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	29.515.367.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.431.080.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	33.019.053.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.165.157.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	517.877.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.397.876.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.111.000.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.057.974.000,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.433.594.000,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.300.000.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	24.950.000.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	4.848.201.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	28.121.446.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.864.514.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	14.994.497.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	4.734.874.000,00
4.2.01.01.03.0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.333.304.000,00
4.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	309.685.780.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	94.443.290.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	147.020.207.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.939.557.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	554.625.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.078.800.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.323.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	611.687.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.243.650.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	525.170.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	15.291.600.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.700.620.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.564.322.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	506.044.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	19.879.206.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	243.674.506.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	243.674.506.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	243.674.506.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.767.692.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.767.692.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.767.692.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	196.984.150.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	129.718.180.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.718.180.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33.004.017.804,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.095.453.802,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.374.944.545,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	518.014.858,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	50.725.748.991,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	67.265.970.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	67.265.970.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	67.265.970.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.084.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.084.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.254.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.254.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.254.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	830.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	830.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	830.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.076.589.927.944,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.480.525.124.786,00
5.1.01	Belanja Pegawai	799.992.431.262,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	528.596.359.414,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	386.508.045.415,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	289.026.819.571,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	97.481.225.844,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.571.661.993,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.943.100.977,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.628.561.016,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.371.176.225,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.371.176.225,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.078.512.938,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	25.371.749.913,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.706.763.025,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.227.150.897,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.227.150.897,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.556.498.998,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.737.421.316,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.819.077.682,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.239.500.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.239.500.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.475.089,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.975.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.500.089,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.706.337.859,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.900.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.806.337.859,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.100.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	700.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	400.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.200.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.100.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.100.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	91.350.083.817,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.835.588.495,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.537.122.010,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.298.466.485,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.500.495.841,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.161.408.558,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	339.087.283,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	90.325.352,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	90.325.352,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	50.923.674.129,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	42.958.632.075,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	7.965.042.054,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	153.358.332.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	138.334.201.304,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	138.334.201.304,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	554.625.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	554.625.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	711.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	711.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.843.943.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.843.943.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	8.686.005.696,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	8.686.005.696,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.228.557.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	2.228.557.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.063.139.594,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.695.093,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147.695.093,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	147.073.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	147.073.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	84.772.800,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	84.772.800,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	267.279.750,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	267.279.750,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.292.218.751,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.212.752,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.334.999,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	24.671.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.166.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.904.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.904.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	734.716.437,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.033.250,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.033.250,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.723.990,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.723.990,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.283.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.283.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	54.804,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	54.804,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	450.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	450.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	460.750.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.800.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	38.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	237.500,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.125.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	117.847.500,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.140.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.850.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	237.500.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.250.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	97.146.797,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	4.750.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.710.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.225.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	11.358.818,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	6.428.888,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	333.450,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.899.291,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.597.400,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.062.100,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	380.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	967.100,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	47.500.000,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	52.250,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	403.750,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	8.478.750,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	889.800.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	289.800.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	289.800.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.146.283.154,00
5.1.02.01	Belanja Barang	87.109.870.182,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.863.920.182,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.092.662.334,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.157.723.583,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.227.935.256,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.125.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	76.813.550,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	37.680.650,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	247.482.895,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	13.952.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	642.993.690,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	26.743.180,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	69.357.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.054.468.481,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.715.452.849,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.360.906.478,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	163.629.801,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	375.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	889.577.835,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	955.562.802,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.439.590,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.323.701.273,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	47.614.180,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.568.514.794,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.745.210.314,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.873.635.840,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.441.498.167,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.016.252.286,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	540.607.280,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	111.200.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	147.310.760,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.801.506.010,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	7.244.136.800,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.308.720.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.610.165.744,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.827.120.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	392.986.860,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	302.095.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	287.678.750,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	250.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	571.750.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	271.722.500,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	87.802.500,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	242.028.750,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	61.898.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	7.400.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	600.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	301.450.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	642.031.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	69.000.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	17.400.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	79.410.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	9.810.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	69.600.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	166.540.000,00
5.1.02.01.04.0107	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	0,00
5.1.02.01.04.0109	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.240.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	6.800.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	130.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	158.122.827.341,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	108.107.092.348,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.154.447.648,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	227.550.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	14.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.165.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.790.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	363.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.062.820.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.164.458.800,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	556.787.620,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.724.412.726,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.042.100.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	448.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	565.680.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	912.880.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	232.680.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	130.950.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.421.642.578,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	92.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.795.410.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.671.856.520,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.303.151.439,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	726.700,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	373.400.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20.830.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	220.010.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	9.172.984.441,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	189.750.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.015.678.540,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	57.675.450,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	487.305.680,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	172.126.758,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	120.412.618,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.526.554.678,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.914.798.480,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	846.306.423,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.860.169.817,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	289.125.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.440.096.602,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	151.345.280,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.335.263.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	356.043.050,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	12.421.202.129,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	157.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	540.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	25.520.871,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	755.509.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.011.614.759,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.038.869.920,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	33.819.962.400,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.080.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.978.861.049,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	762.699.075,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	244.961.915,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	79.700.000,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	5.533.400,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	971.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	56.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	162.313.027,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	18.200.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	25.000.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	91.613.027,00
5.1.02.02.03.0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	26.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	1.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.717.530.656,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	4.200.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.758.406,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	695.860.500,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	80.100.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	107.644.750,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	47.147.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	299.800.000,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	750.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	79.600.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	11.560.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	335.110.000,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	18.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	778.768.420,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	31.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	443.610.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	64.528.420,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	163.130.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	8.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.000.000,00
5.1.02.02.06.0093	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	12.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	89.658.658,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	75.172.500,00
5.1.02.02.07.0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	3.810,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	11.982.348,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	840.950.030,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	142.350.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	74.998.030,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	12.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	145.300.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	93.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	70.350.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	99.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	173.952.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.568.064.863,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	75.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	49.750.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	219.392.835,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	22.400.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	185.250.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	282.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	295.750.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	308.512.028,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	50.000.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	80.010.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	111.250.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	111.250.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.036.661.280,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	788.138.280,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	248.523.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	667.723.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	15.960.000,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	55.860.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.980.000,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	184.731.300,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	798.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.394.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	370.000.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.200.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.127.919.553,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.675.771.123,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	21.376.000,00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	30.368.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	52.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.953.043.325,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.591.949.987,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	384.595.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	314.882.622,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	500.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	890.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.080.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	283.986.389,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	171.460.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.240.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.325.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.666.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.500.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.500.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	3.703.510,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	800.000,00
5.1.02.03.02.0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	15.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	374.689.100,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	107.415.590,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	75.100.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	46.400.000,00
5.1.02.03.02.0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	11.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.826.348.430,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.940.286.885,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	16.672.550,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.484.530,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	40.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	53.053.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	32.387.380,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	237.122.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	455.342.085,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.583.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.354.200.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	162.000.000,00
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000,00
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	584.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.071.600.000,00
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	120.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	57.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	70.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	42.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	32.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.811.465.317,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.811.465.317,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.063.549.801,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	5.861.277.280,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.405.161.186,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	347.270.050,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	134.207.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.554.405.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.510.805.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	643.055.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	388.600.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	479.150.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.600.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	40.600.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.277.099.017,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	66.277.099.017,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	66.277.099.017,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.142.696.744,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.142.696.744,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	153.142.696.744,00
5.1.04	Belanja Subsidi	450.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	450.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	450.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	450.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05	Belanja Hibah	144.864.910.370,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.079.157.800,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	29.714.157.800,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	29.714.157.800,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	365.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	365.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.252.642.570,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.400.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.450.400.000,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.989.868.570,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.566.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	39.423.868.570,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.762.374.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.328.400.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	19.433.974.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	12.045.150.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.045.150.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.045.150.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.074.400.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.074.400.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.074.400.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	19.413.560.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15.271.800.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	15.271.800.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.141.760.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.141.760.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.071.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.086.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.086.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.086.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.600.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.600.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.385.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.385.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.385.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	228.707.778.637,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.999.350.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.999.350.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	250.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	250.000.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.249.350.000,00
5.2.01.01.02.0002	Belanja Modal Tanah Kering	2.249.350.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.500.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.315.333.121,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.678.756.892,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.726.100.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.715.600.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	10.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.952.656.892,00
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	2.980.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	13.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	16.500.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.633.303.392,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	309.853.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.219.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.219.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.581.720.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	704.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	933.280.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	142.155.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	50.855.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	50.855.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	91.300.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	16.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	75.300.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	212.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	212.700.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	13.000.000,00
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5.000.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	194.700.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.433.514.690,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.879.036.580,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.871.036.580,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.467.778.110,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.316.715.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	33.153.930,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.080.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.106.328.580,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	86.700.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	11.500.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	45.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.000.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	4.300.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	10.400.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	575.767.960,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	537.690.460,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	186.590.460,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18.500.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	323.600.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	23.077.500,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.577.500,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	15.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	500.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	15.000.000,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	15.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.395.622.752,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	195.607.200,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	21.320.800,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	10.295.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	7.000.000,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	900.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	19.591.400,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	136.500.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.200.015.552,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.200.015.552,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	576.106.800,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	271.481.800,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	241.481.800,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	304.625.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	284.625.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.508.939.027,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.853.944.392,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	280.799.998,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.547.727.950,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.025.416.444,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	654.994.635,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	6.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	392.667.540,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	83.650.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	172.677.095,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	25.120.000,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	25.120.000,00
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	25.120.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	85.700.000,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	57.000.000,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	57.000.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	28.700.000,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	1.200.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	27.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.354.400.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.354.400.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.344.400.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.000.000,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	20.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	87.550.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	87.550.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	87.550.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.525.421.038,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	54.525.421.038,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.525.421.038,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.142.500.000,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	1.954.800.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.361.564.608,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.014.332.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.765.080.020,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.222.400.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	267.452.410,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	680.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.767.292.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.924.846.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	114.385.946.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	108.669.646.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	98.737.946.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	9.931.700.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.716.300.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	5.716.300.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.768.000.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.768.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.768.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.770.900.000,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	4.770.900.000,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	4.770.900.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.082.233.709,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.806.352.100,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.640.700.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	5.640.700.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	165.652.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	165.652.100,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	275.881.609,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	275.881.609,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	275.881.609,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	860.594.769,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	860.594.769,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	860.594.769,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	860.594.769,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	395.415.450.070,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.940.500.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.940.500.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.940.500.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.110.635.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.110.635.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.110.635.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	386.364.315.070,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	386.364.315.070,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	386.364.315.070,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	33.391.600.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	243.674.506.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	109.298.209.070,00
	Jumlah Belanja	2.110.148.353.493,00
	Total Surplus/(Defisit)	-33.558.425.549,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.638.425.549,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.620.530.749,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	0,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	0,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	0,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	0,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	0,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	0,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0,00
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6.1.01.01.03.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00
6.1.01.01.04.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.	0,00
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	0,00
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00
6.1.01.01.04.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00
6.1.01.01.04.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	0,00
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	0,00
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	0,00
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	0,00
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	0,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
6.1.01.02.01.0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
6.1.01.02.01.0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00
6.1.01.02.01.0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00
6.1.01.02.01.0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
6.1.01.02.01.0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00
6.1.01.02.01.0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
6.1.01.02.01.0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00
6.1.01.02.01.0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.02.01.0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00
6.1.01.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	0,00
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
6.1.01.02.01.0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00
6.1.01.02.01.0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00
6.1.01.02.01.0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	0,00
6.1.01.02.01.0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	0,00
6.1.01.02.01.0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00
6.1.01.02.01.0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	0,00
6.1.01.02.02.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
6.1.01.03.01.0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00
6.1.01.03.01.0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.1.01.04.01	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.01.04.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	28.620.530.749,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	18.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	8.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00
6.1.01.05.01.0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	0,00
6.1.01.05.01.0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	0,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0,00
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00
6.1.01.05.01.0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00
6.1.01.05.01.0039	Penghematan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	10.620.530.749,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00

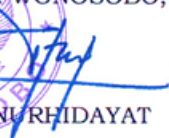
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00
6.1.01.05.02.0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00
6.1.01.05.02.0015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi	0,00
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	0,00
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	0,00
6.1.01.05.02.0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	0,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.620.530.749,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	0,00
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.1.01.07.02	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.1.01.07.02.0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.080.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.080.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.080.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.080.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.080.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.080.000.000,00
	Pembiayaan Netto	33.558.425.549,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Wonosobo, 27 Desember 2023



BUPATI WONOSOBO,



AFIE NURHIDAYAT